



MEMBERS ALERT

Dewan Pimpinan Nasional



Permata Kuningan Lantai 10
 Jl. Kuningan Mulia Kav.9C
 Guntur-Setiabudi, Jakarta 12980
 Telp: 021 8378 0824 (Hunting)
 Fax: 021 8378 0823/ 8378 0746
 Email: sekretariat@apindo.or.id

YOUR BUSINESS PARTNER IN INDONESIA

Pada 20 Oktober 2014 menjadi hari besar bagi bangsa Indonesia.

Sejarah mencatatkan Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7 bersama dengan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI. Sebagai pemimpin baru, sejumlah pekerjaan rumah telah menghadang pemerintahan mereka pada masa Kepemimpinan Nasional 2014 - 2019. Beberapa pekerjaan rumah tersebut, diantaranya:

1. Kenaikan Harga BBM

Pemerintahan Jokowi – JK dihadapkan pada permasalahan tidak populer, seperti kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Hal ini lantaran adanya rencana untuk menaikkan harga BBM pada kepemimpinannya demi menyelamatkan ruang fiskal yang saat ini sudah dinilai sempit.

Jokowi, dalam pidato nya yang disampaikan saat launching Roadmap Perekonomian APINDO pada akhir September silam, mengatakan ada dua ruang yang bisa memperbesar ruang fiskal, yaitu melalui pengalihkan subsidi BBM kepada sektor produktif dan efisiensi anggaran. Lebih lanjut terkait sikap pemerintahan Jokowi – JK terkait kenaikan harga BBM dan upaya perluasan ruang fiskal, [klik di sini](#).

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah juga menjadi masalah krusial yang perlu disikapi dalam pemerintahan baru. Dalam Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia 2014, di Jakarta (8/9/2014) lalu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Pengusaha, Anton J. Supit, mengungkapkan masalah ketenagakerjaan, terutama upah minimum, menjadi isu krusial bagi Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif. Upah akan kompetitif, jika pemerintah membantu kompensasi atas beberapa kebutuhan pekerja (seperti kesehatan dan transportasi), menjadikan harga barang kompetitif sehingga penjualan dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara signifikan.

Permasalahan ketenagakerjaan, terutama menyangkut Upah Minimum Provinsi (UMP), Anton mengatakan kenaikan upah minimum yang

signifikan mengakibatkan beberapa perusahaan, terutama perusahaan kecil, gulung tikar atau relokasi ke daerah lain yang UMP/UMK lebih kecil karena tidak mampu membiayai karyawannya. Hal ini berpotensi meningkatkan pengangguran atau sektor informal. "Upah sundulan" juga menjadi salah satu permasalahan karena adanya gap yang terlalu dekat antara upah minimum dengan upah rata-rata.

Dalam hal ini di beberapa daerah terdapat UMP/UMK yang lebih tinggi dari KHL. Hal ini, menurut Anton, bertentangan dengan Permenakertrans nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa UMP harus menuju KHL, bukan melebihi. Isu upah ini dapat dibaca lebih lanjut pada tautan [di sini](#).

APINDO memberikan sejumlah rekomendasi bagi terciptanya Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan yang dapat menjadi referensi bagi pemerintahan baru dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Secara jangka pendek, rekomendasi diberikan dengan mendorong pemerintah untuk menetapkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat merevisi UU no. 13/2003 yang mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Lebih lanjut tentang Rekomendasi APINDO atas Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan, silakan [klik di sini](#).

3. Kenaikan Tarif Listrik

Terkait tarif listrik, Ketua APINDO, Franky Sibarani mengungkapkan bahwa dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 agar dunia usaha tetap kompetitif dari beban biaya, maka APINDO mengharapkan dukungan pemerintah agar tidak menaikkan tarif listrik, khususnya untuk keseluruhan tarif yang masuk dalam kategori industri dan bisnis. Sikap APINDO ini didasari pada perekonomian saat ini yang dinilai berat, terlebih dengan kenaikan listrik yang terjadi sebelumnya sehingga hal tersebut telah membebani dunia usaha.